

# **PATRON-CLIENT RELATIONSHIP PADA MASYARAKAT MADURA**

Moh. Hefni

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.  
Kontak person 081231410002, alamat Pademawu Sampetoh Pamekasan)

## **Abstrac**

*This article traces patron-client relationship of Madurese both from socio-historical point of view and its contemporary progress. As an imbalance social-exchange relationship, in terms of patron-client relationship, second side (client) much highly depends upon the first side (patron). This had been experienced in Madurese social history during the native governmental period of time. The government was classified into two major classes; ruler class (patron) and farmer class (client). The former is fully in authority to take control either economic or politic potencies, however, the later transacts labors to the first side. Both side is connected by a bribe (upeti) systems—percaton, apanage and daleman. In current progress this relationship becomes more acquaintance, it covers economic and politic relationship. The success of Trunojoyo, the king of Sumenep's inherit, against the Mataram domination had been supported by Madurese people that had previously tightened to the system. Today, patron-client relationship in Madura is reflected in the relationship between the head of village, as the owner of percaton, and the staff as well as people, as the percaton manager. The other is well-described in the relationship of ship owner and pandega (fisher) in fishing. Once the relationship is set up, it directs to diadik relation, a two in one relation which is more personal and long lasting one.*

## **Kata-kata kunci**

*Patron-klien, percaton, apanage, panembahan, rakyat, daleman, kepala desa, juragan, pandega, dan diadik.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling majemuk komposisi jati diri budaya dan etniknya, dan kemajemukan itu menjadi salah satu sumber kebanggaan bangsa. Negara yang dihuni oleh ratusan kelompok etnik dan kaya akan bahasa dan kebudayaan daerah secara historis dipersatukan oleh kesamaan nasib yang dijajah oleh

kolonial Belanda selama ratusan tahun. Bukan hanya menjajah, pemerintah kolonial juga secara aktif memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan identitas-identitas ras dan kultural di dalam masyarakat-masyarakat jajahannya. Formasi-formasi bentukan kolonial tersebut, ironisnya, diteruskan oleh negara pasca-moderen dengan cara-cara yang sebagian menyerupai

representasi yang dibuat bangsa jajahannya.

Vickers<sup>1</sup>, misalnya, menaruh perhatian terhadap kapasitas kekuasaan negara Indonesia, baik ketika masih berada di tangan Belanda selama masa penjajahan maupun di tangan pemerintah Orde Baru dulu, untuk membentuk dan mendesain etnisitas dan identitas kultural, walaupun ini tidak bisa ditafsirkan secara simplistik bahwa negara memiliki kemampuan untuk membentuk identitas budaya, seperti identitas Madura, Dayak, Bali, dan sebagainya. Semua bangsa Indonesia selama masa penjajahan dikonseptualisasikan sebagai *other*. Pemerintah Orde Baru, melalui berbagai cara, telah meneruskan penilaian kolonial terhadap suku bangsa selain Jawa sebagai *other* terhadap jati diri pemerintah yang Jawa-sentris. Hanya dengan mengatakan bahwa sebuah logika *otherness* serupa digunakan, tidak berarti bahwa pihak yang secara politis dominan melakukan pendekatannya kepada semua kelompok yang tersubordinasi dengan cara yang sama. Misalnya saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pichard<sup>2</sup> penjajah kolonial Belanda ikut menyumbang bagi terbentuknya citra-citra stereotip kelompok-kelompok etnis, seperti Bali. Termasuk dalam kaitan ini adalah bahwa pemerintah kolonial Belanda ikut membantu bagi terbentuknya formasi-formasi stratifikasi sosial antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa, antara raja dengan petani, pengrajin, dan

sebagainya. Dalam kaitan ini, pemerintah kolonial juga ikut membentuk stratifikasi sosial di Madura antara *oréng rajâh* (kaum bangsawan) dan *oréng kéné'* (rakyat biasa). Karenanya, dalam makalah ini akah disajikan hubungan patron-klien dalam sebuah etnis Madura, baik yang pernah terjadi dalam sejarah sosialnya maupun dalam perkembangannya pada saat ini.

### Patron-Klien: Sebuah Hubungan Ketergantungan Ekonomi dan Politik

Istilah patron berasal dari Bahasa Latin "*patrōnus*" atau "*pater*", yang berarti ayah (*father*). Karenanya, ia adalah seorang yang memberikan perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Sedangkan klien juga berasal dari istilah Latin "*cliēns*" yang berarti pengikut.<sup>3</sup> Dalam literatur ilmu sosial patron merupakan konsep hubungan stata sosial dan penguasaan sumber ekonomi. Konsep patron selalu diikuti oleh konsep klien, tanpa konsep klien konsep patron tentu saja tidak ada. Karenanya, keduanya istilah tersebut membentuk suatu hubungan khusus<sup>4</sup> yang disebut dengan istilah *clientelism*.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Lihat istilah *patron* dan *client* pada Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, edisi kedua (Oxford: Oxford University Press, 1975) dan Peter Davies (ed), *The American Heritage Dictionary of The English Language* (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977).

<sup>4</sup> Hubungan khusus di sini dicirikan oleh suatu hubungan yang lebih bersifat personal dan vertical, yakni hubungan hubungan pribadi yang bersifat superior-inferior. Lebih lanjut baca Mushtaq H. Khan, "Patron-Client Networks And The Economic Effects Of Corruption In Asia" *European Journal of Development Research*, Vol. 10 No. 1 (June 1998), hlm 15-39.

<sup>5</sup> Sebagai sebuah konsep, *clientelism* dipandang sebagai sebuah proses evolusioner yang menimbulkan kesadaran akan adanya ikatan kekeluargaan yang kuat yang mampu memberikan keamanan fisik, ekonomi, dan emosional. Selain itu, konsep itu juga memunculkan kesadaran akan ketidaksamaan akses pada barang dan sumber. Lebih lanjut baca Sumeeta Shyamsunder Chandavarkar, *Patron-Client Ties and*

<sup>1</sup> Andrian Vickers, *Bali: A Paradise Created* (Ringwood: Penguin Book Australia Ltd., 1989).

<sup>2</sup> Michel Pichard, "Cultural Tourism, Nation-Building, and Regional Culture: The Making a Balinese Identity", dalam Michel Pichard & Robert E. Wood (Eds.), *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997).

Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk organisasi sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, di mana patron yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya dan miskin.<sup>6</sup> Imbalannya, klien memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan,<sup>7</sup> dan bahkan dukungan politik<sup>8</sup> kepada patron,

Dalam bahasa Marxian, patron merupakan kelas yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga ia dapat melakukan eksploitasi terhadap klien yang banyak menggunakan alat produksi yang dimiliki patron. Masih dalam konsepsi Marxian, patron akan mengeluarkan modalnya untuk dua hal, yaitu membeli alat-alat produksi dan sebagian lagi untuk membeli tenaga kerja (klien). Klien tidak mempunyai apa-apa kecuali menjual tenaga kerja mereka.<sup>9</sup> Hubungan patron-klien tersebut tidak

saja terbatas pada eksploitasi tetapi sampai kepada tingkat ketergantungan yang tinggi.<sup>10</sup> Ketergantungan yang dimulai dari satu aspek sosial umumnya berkembang menjadi ketergantungan yang luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan sosial lainnya.<sup>11</sup>

Menurut konsep di atas, hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Dengan kata lain, kedua pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat kepentingan (*interest*) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum.<sup>12</sup> Persekutuan semacam itu dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk mempunyai sekutu (*encon*) yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih tinggi (*superior*) atau lebih rendah (*inferior*) daripada dirinya. Persekutuan antara patron dan klien merupakan hubungan saling tergantung. Dalam kaitan ini, aspek ketergantungan yang cukup menarik adalah sisi ketergantungan klien kepada patron. Sisi

*Maoist Rural China* (Thesis MA pada Departmen of Political Science, University of Toronto, 1997), hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Karenanya, patron-klien adalah hubungan pertukaran sosial antara dua orang atau lebih yang berkembang ke arah hubungan pertukaran yang tidak seimbang, di mana patron mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang klien. Kedudukan lebih tinggi (*superior*) ini disebabkan karena adanya kemampuan, status, dan kekuasaan lebih besar dari patron ketimbang klien. Lihat Chris Johnson, Terry and Dandeker, "Patronage: Relation and system", dalam *Patronage in Ancient Society*, ed. Andrew Wallace-Hadrill (London: Routledge, 1990), hlm. 220.

<sup>7</sup> N. R. W. Abdullah, "Eradicating Corruption: The Malaysian Experience", *JOAAG*, Vol. 3. No. 1 (2008). Lihat juga Jeremy Kemp, "The manipulation of personal relations: From kinship to patron-clientage", dalam *Strategies and structures in Thai Society*, ed. Hanten Brummelhuis dan Jeremy H. Kemp, (Amsterdam: Anthropological-Sociological Center, University of Amsterdam, 1984), 57.

<sup>8</sup> Eric R. Wolf, "Kinship, Friendship, dan Parton-Client Relation in Complex Societies", dalam *Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientelism*, eds. Steffen W. Schmidt, et.al. (Berkeley: University of California Press, 1977), hlm. 174.

<sup>9</sup> Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 58.

<sup>10</sup> Dalam hubungan patron-klient semacam ini, Peter Flynn mengkategorikannya sebagai *culture of powerless* (budaya ketidakberdayaan), di mana sedikit sekali orang yang merasakan kenikmatan sebagai klien. Baca Peter Flynn, "Class, Clientelisme, and Coercion: Some Mechanism of Internal Dependency and Control", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, Vol. 12 No. 2 (1974), hlm. 151.

<sup>11</sup> J.D. Prothro, "Peasant Society and Clientelist Politics", *American Political Science Review*, No. 64 (1970).

<sup>12</sup> Carl H. Lande, "Group Politics and Diadic Politics: Notes for a Theory", dalam *Friends, Followers, and Factions*, hlm. 508. Walaupun demikian, terdapat beberapa kasus di mana patron dan klien sama mengejar kepentingan umum, tetapi ini terjadi ketika pencapaian tujuan patron merupakan prasyarat bagi pencapaian tujuan klien. Baca Carl H. Lande, "Introduction: The Dyadic Bases in Clientelism", dalam *Friends, Followers, and Factions*, hlm. xii.

ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. Patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menguasai sumber daya ekonomi dan politik cenderung lebih banyak menawarkan satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien sendiri tidak selamanya mampu membalas satuan barang dan jasa tersebut secara seimbang. Ketidakmampuan klien di atas memunculkan rasa hutang budi klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat melahirkan ketergantungan. Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam salah satu aspek kehidupan sosial, dapat meluas ke aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

Dalam kaitan dengan komunitas petani di desa, Scott<sup>13</sup> dan Popkin<sup>14</sup>, secara berbeda melihat hubungan patron-klien. Bagi Scott, hubungan patron-klien bagi petani merupakan satu sistem jaminan kelangsungan hidup. Walaupun hubungan itu merupakan bentuk eksploitasi bagi petani, tetapi sangat diperlukan. Dalam hukum etika subsistensi, bagi petani di desa hubungan patron-klien bagaikan malaikat ketika menjelang musim panen tiba, perayaan atau bencana. Persepsi Scott, tentu sangat berbeda dengan Popkin yang mencoba memahami petani melalui pendekatan ekonomi-politik dengan tidak membedakan sistem ekonomi petani dengan ekonomi pasar. Bagi Popkin

hubungan patron-klien merupakan bentuk eksploitasi yang membuat petani tertekan. Dalam hubungan politik, patron-klien merupakan hubungan penyaluran aspirasi. Patron politik tidak hanya melalui hubungan ekonomi, tetapi juga melalui kepeimpinan informal yang muncul karena ekonomi, keturunan, dukun, adat dan agama dan pendidikan. Masyarakat di pedesaan menyalurkan aspirasi politiknya kepada patronnya untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Melalui patron tersebutlah petani ikut serta mengambil keputusan politik. Patron politik pula tidak mungkin mengabaikan kepentingan masyarakat karena menyangkut status kepentingan juga melekat kepada masyarakat. Status kepemimpinan informal akan hilang apabila keberpihakannya kepada masyarakat berkurang. Analisis hubungan patron-klien dalam politik lebih mudah menggunakan model Scott dengan mengubah unit analisis dari hubungan ekonomi ke hubungan politik. Scott menganalisis bahwa hubungan patron-klien tidak dilihat merugikan petani, karena jaminan makanan sepanjang tahun dari patron dan patron memerlukan produksi pertanian dari petani.

Secara konseptual, hubungan ketergantungan klien kepada patron dapat terlihat dalam kehidupan buruh tani, pengrajin dan majikan atau *juragannya*. Buruh tani atau pengrajin sebagai pihak yang mempunyai kedudukan lebih rendah, dapat tergantung kepada juragan tersebut dalam rangka melakukan kegiatan kerjanya. Dalam usaha mengatasi keterbatasan menguasai sumber daya seperti modal atau biaya produksi, alat-alat produksi dan akses pasar banyak diantaranya menempuh dengan menjalin

---

<sup>13</sup> James C. Scott, "Patron-Client Politics and political Change in Southeast Asia", *American Political Science Review*, No. 66 (1972). Lihat juga Idem, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University Press, 1983).

<sup>14</sup> Samuel L. Popkin, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Illinois: FF. Peacock Publishers Inc., 1979).

hubungan kerja dengan juragan. Hubungan kerja antara buruh dan juragan merupakan hubungan pertukaran ekonomi yang berlangsung menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama ( atau terpaksa disepakati oleh pihak buruh). Kedua pihak yang terlibat dalam hubungan ini, mempunyai tujuan sama yaitu memperoleh keuntungan. Karena adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan seperti itu, maka hubungan kerja dapat berlangsung lama. Hubungan yang berlangsung lama, memungkinkan bagi buruh untuk memperoleh sumber daya bukan lagi atas dasar keuntungan hubungan ekonomi saja, melainkan juga berdasarkan kepercayaan (*trust*). Hubungan patron-klien tampak dengan adanya ketergantungan buruh dan juragan, dapat menimbulkan kerugian selain keuntungan bagi buruh. Kerugian menjalin hubungan patron-klien yang dialami buruh dapat ditelusuri dengan melihat keterikatan kepada juragan dalam memperoleh sumber daya, serta adanya pengorbanan waktu, tenaga untuk keperluan sosial budaya majikan.

Dalam lintasan sejarah, konsep patron-klien telah terjadi sejak zaman Romawi kuno. Setiap bangsawan (*patronus*) mempunyai sejumlah orang dari tingkat strata yang lebih rendah (*clientes*) yang berharap perlindungan darinya. Para *clientes* sebenarnya adalah orang bebas namun realitasnya mereka tidak sepenuhnya merdeka. Hubungan mereka sangat dekat, hal ini terlihat pada nama keluarga pelindungnya mereka gunakan dan mereka ikut dalam upacara pemujaan keluarga bangsawan yang mereka anggap sebagai pelindung. Hubungan patron dan klien di Romawi dibangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal-balik dan bersifat turun temurun.

Patron berkewajiban untuk menjaga kliennya dari musuh-musuh dan melindunginya dari tuntutan hukum. Di samping itu, patron juga membantu keluarga kliennya dalam hal ekonomi, dengan memberikan lahan kepada pengikutnya agar dapat menghidupi seluruh anggota keluarganya. Di sisi lain, klien juga berkewajiban untuk membantu patronnya dalam kondisi tertentu, seperti menebus sang patron jika ditangkap sebagai tawanan perang, atau membayar biaya perkara yang harus dibayar patron. Model patron-klien ini juga diterapkan pada berbagai masyarakat dalam berbagai periode sejarah. Hubungan patron-klien menjadi bagian dalam sistem sosial politik masyarakat di beberapa belahan dunia seperti di Eropa, terjadi di Italia dan juga di Amerika Latin, semisal di Meksiko. Sedang patron-klien di Asia terjadi di Filipina, Burma, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Dan di Timur Tengah, terjadi di negara-negara seperti Irak dan Iran.<sup>15</sup>

### **Patron-Client Relationship dalam Sejarah Madura**

Di Madura, hubungan patron-klien pernah terjadi pada masa kerajaan pribumi (Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep) yang berlangsung hingga akhir abad ke-19 M.<sup>16</sup> Pada masa itu, terdapat

---

<sup>15</sup> Christian Pelras, "Hubungan Patron Klein pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan", Makalah yang disajikan pada Konferensi Sulawesi Selatan pertama, di Monash University, Melbourne (1981): <http://sulawesi.cseas.kyoto-u.ac.jp/lib/pdf/AAhmadYani.pdf>.

<sup>16</sup> Di Pamekasan, Pemerintahan sendiri dihapuskan pada 1858 M, sedangkan Sumenep dan Madura Barat (Bangkalan) mengikutinya masing-masing pada 1883 M dan 1885 M. Lihat Huub de Jonge, "Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1680 – 1883", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, Ekonomi: Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm. 2.

dua kelas utama, yaitu kelas penguasa (patron) dan kelas petani (klien). Kelas penguasa adalah kelas yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan memiliki kekuasaan politik, sedangkan kelas petani adalah kelas yang memiliki tenaga kerja untuk "dijual" kepada kelas penguasa. Keduanya dihubungkan oleh suatu sistem upeti yang berupa *percaton* atau sistem *apanage*.

Di Madura, tidak ada desa yang terbebas dari sistem *percaton*, kecuali desa daleman (milik raja) dan desa *perdikan* (bebas pajak).<sup>17</sup> *Percaton* merupakan sistem "pembayaran gaji dengan sawah" untuk keluarga-keluarga raja dan para pengikutnya yang menganggur.<sup>18</sup> Di kerajaan-kerajaan di Madura, panembahan (raja) adalah pemilik tanah secara nominal, sedangkan pemilik yang sebenarnya adalah rakyat kebanyakan. Panembahan mempunyai hak untuk memungut pajak-pajak pertanian dan pajak-pajak lainnya yang kesemuanya digunakan untuk kepentingan panembahan sendiri dan untuk mendukung organ negara dan para *abdi*.

Pajak tanah pertanian di desa-desa *percaton* dikumpulkan dengan salah satu cara, yaitu pajak kontan senilai seperempat dari penghasilan bersih atau dengan cara kedua, yaitu pajak *in natura* hasil bumi yang dipungut sewaktu panen. Dengan demikian, desa *percaton* atau desa *apanage* merupakan tulang

punggung organisasi negara, sumber-sumber pendapatan panembahan, para keluarganya, dan para pejabat. Rakyat atau petani (klien) juga sangat bergantung pada tanah tegal untuk penghidupan mereka. Di tanah tegal tegal itu, petani mempunyai hak turun-temurun untuk menanami tanah selama mereka memenuhi kewajibannya kepada raja dan para pemegang *apanage*-nya. Terdapat dua jenis pajak penting yang dikenakan kepada para petani, yaitu pajak kepala dan pajak tanah.<sup>19</sup> Pajak kepala adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh kepala keluarga dan dipegang sendiri oleh raja. Sedangkan pajak tanah berupa hasil panen jagung dan palawija yang pertama dan kedua yang jumlahnya mulai dari sepertiga hingga seperlima dari hasil panen serta hasil panen pohon buah-buahan. Pajak tanah ini dibagikan-bagikan oleh raja seluruhnya atau sebagian dalam bentuk *apanage*. Para pemegang *apanage* tinggal di istana, sedangkan kepentingan mereka diurus oleh para wakil setempat. Selama masa panen, mereka akan berkeliling ke seluruh wilayah untuk mengumpulkan upeti.

Selain melalui desa *percaton*, panembahan (sebagai patron) juga memiliki hubungan ketegantungan ekonomi dengan rakyat (sebagai klien) melalui pengelolaan desa *daleman*. Desa *daleman* adalah desa milik raja karena mendatangkan penghasilan bagi panembahan. Sebagai tanah pertanian yang paling baik, panembahan mengklaim mempunyai hak miliki sepertiga dari hasil semua tanah pertanian di setiap desa *daleman*. Selebihnya menjadi hak milik petani. Pajak hasil bumi yang dikenakan kepada

---

<sup>17</sup> Tanah *perdikan* adalah tanah bebas pajak yang diberikan oleh raja kepada para pemimpin keagamaan atau kyai. Kyai sepenuhnya memiliki hak untuk mengusahakan tanah itu. Contoh tanah *perdikan* adalah tanah yang terdapat di Desa Prajjan Sampang yang dipimpin oleh Kyai Semantri. Karenanya, desa itu disebut sebagai desa *perdikan*. Desa *perdikan* merupakan desa independen yang mirip sebuah Negara kecil dengan sistem pembayaran upeti tersendiri.

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940* (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 113.

---

<sup>19</sup> Jonge, "Pembentukan Negara", hlm. 25.

para petani juga sepertiga dari hasil panen. Orang-orang di desa *daleman* yang mengerjakan sawah panembahan hanya menerima sedikit bagian, yakni seperenambelas hingga seperlimabelas dari hasil waktu panen itu.<sup>20</sup> Dalam sistem pertukaran ini, jelas terlihat adanya eksploitasi petani sebagai klien oleh kaum penguasa sebagai patron, di samping juga keuntungan yang dimiliki petani. Namun demikian, hubungan pertukaran ini berlangsung lama karena ia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan ketergantungan ekonomi, tetapi juga hubungan prestise atau kebanggaan petani yang merasa tenaga kerjanya dihargai oleh penguasa (raja).

Karenanya, kesetiaan para petani kepada para pemegang *apanage*-nya sangat tinggi. Acapkali para petani dimobilisasi oleh pemegang *apanage* untuk melakukan pemberontakan kepada raja (panembahan). Di Kerajaan Sumenep, misalnya, di mana para pemegang *apanage* bergerombol di sekitar raja. Para penasihat dan sanak keluarga raja dengan potensi mobilisasi rakyat acapkali bersekongkol untuk menggeser perimbangan kekuasaan.<sup>21</sup> Dengan kata lain, hubungan keduanya bukan lagi sekedar hubungan ketergantungan ekonomi, tetapi juga memasuki wilayah politik. Ini mempertegas pertukaran asimetris antara patron dengan pengikutnya atau petani yang tertekan

secara ekonomi akan memperoleh nafkah dari si pemimpin/pemegang *apanage*, tetapi sebagai imbalan ia secara suka rela memberikan tenaganya atau bahkan nyawanya, sekalipun kewajiban itu tidak pernah ditegaskan sewaktu menerima kebaikan hati yang semula. Keberhasilan pemberontakan Trunojoyo (1777 – 1680 M), salah seorang keturunan raja Sumenep, melawan dominasi Mataram tidak bisa dilepaskan dari dukungan rakyat Madura yang berada dalam sebuah hubungan ketergantungan ekonomi dan politik dengannya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, rakyat Madura dengan bantuan pasukan-pasukan Makasar yang dipimpin oleh Kraeng Galengsong, Kraeng Naba, dan Montemaranu<sup>22</sup> berhasil melepaskan diri dari dominasi dan penindasan Jawa. Belum puas dengan pembebasan Madura, kaum pemberontak itu terus melaju ke Pulau Jawa dan berhasil menduduki bagian-bagian luas dari Kerajaan Mataram.

Pemberontakan Trunojoyo yang melibatkan rakyat sebagai klien itu dapat diperbandingkan dengan pemberontakan Darul Islam di Sunda Jawa Barat. Sebagaimana yang ditelusuri oleh Jackson, mengapa desa-desa di Sunda membuat pilihan-pilihan yang berbeda berkenaan dengan pemberontakan Darul Islam. Kesimpulannya adalah bahwa integrasi politik di kalangan orang Sunda bergantung atas sistem hubungan kewibawaan tradisional yang menjiwai kehidupan sosial desa dan mempertalikan setiap desa dengan dunia politik daerah dan nasional yang ada di luar batas desa. Dapat dikatakan bahwa

<sup>20</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial*, hlm. 142. Lihat juga Elly Touwen-Bouwisma, "Kepala Desa Madura: Dari Boneka ke Wiraswasta", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi: Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 147-149.

<sup>21</sup> Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam (Suatu Studi Antropologi Ekonomi)*, (Jakarta: Kerjasama Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal – Land – en Volkenkunde (KITLV) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama PT. Gramedia, 1989), hlm. 48.

<sup>22</sup> Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726 – 1745)*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 128.

semua orang Sunda membangun aliansi ke dalam hubungan *diadik* (dwitunggal)<sup>23</sup> yang bersifat pribadi, menyebar, penuh perasaan, dan lestari. Keputusan individu, menurut teori ini, tidaklah didasarkan atas pengetahuan politik, kepercayaan agama atau kepercayaan ideologi para pengikut perseorangan, melainkan atas tempat yang diduduki seseorang dalam struktur hubungan kewibawaan tradisional yang terus-menerus. Karena penempatannya dalam jaringan kewibawaan tradisional tertentu, maka seseorang boleh meminta nasihat, pengajaran rohani, bantuan keuangan, atau dukungan emosional. Dan secara timbal balik, seandainya tokoh kewibawaan tradisional menjadi terlibat dalam politik luar desa, maka para pengikutnya berkewajiban untuk mengerahkan dan menyediakan hak-hak suara atau bahkan perlindungan fisik untuk keperluan tokoh tersebut, tanpa mepedulikan apakah mereka memahami atau menyetujui pendirian politik yang dipilih tokoh kewibawaan tersebut atau tidak.<sup>24</sup>

### **Gejala Patron-Klien pada Masyarakat Madura Saat ini**

Heddy S. Ahimsa Putra<sup>25</sup> menyatakan bahwa gejala patron-klien tetap berlaku di masyarakat pada masa lalu hingga sekarang khususnya di masyarakat Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh tiga kondisi pendukung.

---

<sup>23</sup> Konsep ini mengimplikasikan adanya dua orang individu yang berbeda status mengadakan sebuah ikatan secara vertikal. Lebih lanjut tentang konsep ini baca Chandavarkar, *Patron-Client Ties*, terutama pada bab I.

<sup>24</sup> Bandingkan dengan Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1990).

<sup>25</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang; Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988), hlm. 33-34.

*Pertama*, terdapatnya perbedaan (*inequality*) yang terjadi di masyarakat dalam hal kekayaan dan kekuasaan.<sup>26</sup> Patron mendasarkan dirinya pada pengaturan kekuatan serta jalur mendapatkan jabatan, bukan pada pewarisan kedudukan atau kepemilikan tanah. Kondisi ini berubah pada masa pemerintahan kolonial yang menerapkan komersialisasi ekonomi. Sehingga kepemilikan tanah kemudian menjadi pemicu munculnya gejala patron-klien. *Kedua*, adanya perbedaan penguasaan sumber daya yang kemudian tidak diikuti dengan adanya institusi yang dapat menjamin keamanan individu baik menyangkut status maupun kekayaan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan kelangkaan sumber daya yang tentunya semakin membuat ketidakamanan fisik bertambah besar risikonya karena perbenturan beberapa kepentingan yang tidak dapat dihindari. Hubungan patronase sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keamanan menjadi pilihan jika keamanan sudah semakin terancam dan kontrol sosial tidak bisa dijadikan tempat perlindungan. Memilih untuk "dekat" pada orang yang lebih kuat dengan harapan dapat melindunginya dari ancaman merupakan solusi terbaik masa itu, sehingga secara realitas ikatan-ikatan pribadi telah menggantikan peranan hukum, nilai-nilai bersama dan institusi-institusi yang kuat. *Ketiga*, jika

---

<sup>26</sup> Perbedaan (*inequality*), terutama *power inequality* (perbedaan kekuasaan), merupakan ciri utama dari *patron-client relationship*. Ini merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan status, kekayaan, dan pengaruh. Tanpa adanya *inequality*, hubungan dua orang/pihak itu akan lebih bersifat persahabatan, bukan merupakan hubungan patron-klien. Lihat Rene Lemarchand dan Keith Legg, "Political Clientelism and Development", *Comparative Politics*, Vol. 4 No. 1 (Januari 1975), hlm. 152.

ikatan-ikatan kekerabatan<sup>27</sup> ternyata tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk mencari perlindungan serta meningkatkan penguasaan sumber daya, maka efektifitas hubungan dalam kelompok kekerabatan menjadi semakin berkurang sejak diberlakukannya sistem ekonomi baru oleh pemerintahan kolonial. Untuk itu membina hubungan dengan orang-orang di luar kerabat merupakan tindakan yang jauh lebih efektif untuk memperoleh kekayaan, status, dan kekuasaan.

Di Madura, sejak diperkenalkan pemerintahan langsung dan dihapusnya kerajaan pribumi pada akhir abad ke-19 M, maka pemerintahan Panembahan bersama-sama sistem *apanage* dihapus pula. Semua tanah dinyatakan sebagai milik pemerintah kolonial. Sanak keluarga Panembahan diberi ganti rugi berupa imbalan uang untuk seumur hidup. Sedangkan pejabat Panembahan diberi imbalan uang untuk hidup selama satu tahun sebagai ganti rugi atas hilangnya tanah mereka.<sup>28</sup>

Pada saat yang sama, terjadi reorganisasi pada pemerintahan di pedesaan. Pemerintah kolonial menciptakan desa-desa dengan cara menyatukan petak-petak tanah *apanage* dengan beberapa kampung atau pedukuhan. Pada setiap desa, pemerintah

kolonial mengangkat seorang kepala desa. Biasanya bekas tanah *apanage* yang ada di setiap desa diberikan kepada kepala desa sebagai bayaran atas pengabdian mereka. Pada saat itu, kepala desa dipandang sebagai pejabat terendah dalam dinas pamong praja, yang bertanggung jawab atas penyimpanan segala macam dokumen administratif dan pengumpulan pajak tanah.<sup>29</sup>

Tradisi pembayaran dengan tanah, yang disebut dengan tanah *bengkak* atau tanah *percaton*, terus berlanjut hingga saat ini. Seorang kepala desa bisa menguasai 10 hingga 20 ha lahan pertanian. Walaupun ia harus berbagi dengan perangkat desa lainnya, tetapi ia tetap memiliki bagian terbesar atas tanah itu. Karenanya, ia bisa menjadi patron baik terhadap rakyat atau petani yang menggarap sawahnya maupun terhadap perangkat desa yang ia angkat. Petani penggarap maupun aparat tentu saja sangat bergantung pada kebaikan hati kepala desa, terutama berkaitan dengan berapa bagian tanah yang harus mereka kelola. Penguasaan atas sumber-sumber daya dalam bentuk modal simbolik (berupa seorang kepala desa) dan modal kultural (berupa pengetahuan tentang pengelolaan pemerintahan desa) yang dipadukan dengan modal ekonomi (berupa penguasaan atas sejumlah tanah *percaton*), menjadikan kepala desa sebagai *primus inter pares* dalam komunitasnya. Ia memiliki kewibawaan tradisional sebagai bekal penting dalam membangkitkan kesetiaan rakyat dan aparatnya, termasuk dalam bidang politik. Pola hubungan keduanya dibentuk berdasarkan hubungan *diadik*. Sekali hubungan itu telah dibentuk, yakni

---

<sup>27</sup> Memang ada perbedaan yang tajam antara hubungan kekerabatan (*kinship*) dan hubungan patron-klien. Hubungan kekerabatan bersifat askriptif, dalam arti bahwa seseorang sudah memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang tertentu, misalnya dengan orang tua, saudara, dan sebagainya. Sebaliknya, hubungan patron-klien tidak bersifat askriptif, dalam arti bahwa tidak ada seseorang yang dilahirkan sebagai klien. Hubungan patron-klien adalah hubungan yang diusahakan dan diciptakan. Untuk pembahasan masalah ini, lihat Wolf, "Kinship, Friendship, and Patron Client Relation", hlm. 171-178.

<sup>28</sup> Lihat Kuntowoyo, *Perubahan Sosial*, terutama Bab IV.

---

<sup>29</sup> Elly Touwen-Bouwisma, "Kepala Desa Madura: Dari Boneka ke Wiraswasta", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama*, hlm. 148.

hubungan antara bapak dan anak buah atau hubungan antara patron dan klien penuh dengan arti emosional dan praktis bagi kedua belah pihak. Kewajiban-kewajiban moral yang didorong oleh perasaan hutang budi dapat dikerahkan untuk perilaku politik tanpa mempertimbangkan isi ideologi politik tersebut.

Dalam jaringan penangkapan ikan, hubungan patron-klien juga bisa terjadi antara juragan dan pandega (*pandhigâ*), yakni mereka yang bekerja untuk juragan. Juragan merupakan pemegang pimpinan usaha itu. Ia merupakan pemilik perahu dengan semua perlengkapannya. Di samping itu, ia bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya reparasi. Sedangkan pandega hanya menyediakan tenaga kerja. Mereka melakukan pekerjaan yang diperlukan dalam penangkapan ikan. Hasil penangkapan ikan biasanya dibagi duabelas. Seperenam untuk para nelayan dan seperlima untuk juragan dan satu bagian untuk perahu.<sup>30</sup>

Hubungan keduanya mencerminkan sebuah hubungan ekonomi. Para juragan adalah mereka yang memiliki modal cukup besar untuk mengusahakan penangkapan ikan. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai modal cukup atau hanya memiliki tenaga kerja, memasuki hubungan tersebut acapkali menjadi satu-satunya kemungkinan untuk memastikan hidup (*safety first*). Sekali hubungan sudah terbentuk dengan saling membayar kewajibannya dan mendapatkan haknya secara seimbang,

maka sukar bagi seseorang untuk melepaskan dari ikatan tersebut. Bahkan, kadang-kadang mereka juga berusaha untuk memperkuat hubungan tersebut menuju kepada hubungan yang lebih bersifat pribadi. Dalam keadaan semacam ini, hubungan itu selanjutnya berkembang menjadi sebuah hubungan patron-klien. Selanjutnya, potensi proliferasi jaringan yang ditandai oleh struktur hubungan vertikal yang bersifat *diadik* bisa saja terjadi.

### Penutup

Hubungan patron-klien (*Patron-client relationship*) merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus antara dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk mempunyai sekutu, yakni antara mereka yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih tinggi (*superior*) dengan mereka yang memiliki status dan kekayaan lebih rendah (*inferior*). Mereka berada dalam hubungan unggul-asor (*superior-subordinate*). Sekali seorang patron telah memantapkan dirinya, maka hubungan dengan para kliennya akan berlangsung lama. Hal ini dikarenakan keduanya telah membentuk suatu hubungan *diadik* (dwitunggal), suatu hubungan yang bersifat pribadi yang bermula dari hubungan ekonomi. Karenanya, jika sang patron terlibat dalam politik, maka para pengikut (klien) berkewajiban untuk mengerahkan dan menyediakan hak suara atau bahkan merelakan jiwa demi kepentingan sang patron.

*Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □



---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Syamsul Arifin, seorang juragan dari Desa Padelegan Kec. Pademawu Pamekasan.



